

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3). Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah pembaharuan sistem pendidikan.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan bidang pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (UU No. 20 Tahun 2003).

Pemerintah juga menetapkan empat strategi pokok pembangunan bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut E. Mulyasa (2006: 8) empat strategi pokok pembangunan bidang pendidikan nasional yaitu: 1) peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, 2) relevansi pendidikan dengan pembangunan, 3) peningkatan kualitas pendidikan, dan 4) efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sejalan dengan visi pendidikan nasional dan strategi pokok pembangunan bidang pendidikan tersebut, pembaharuan sistem pendidikan dilakukan salah satu di antaranya adalah pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja. Perubahan kurikulum yang ideal dilaksanakan setiap saat bila ada perubahan ilmu pengetahuan dan tuntutan dari dunia kerja.

Kebijakan relevansi pendidikan dalam strategi pembangunan bidang pendidikan, dititik beratkan pada keterkaitan dan kesepadanan antara materi-materi yang diajarkan di sekolah dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu pembaharuan kurikulum sangat dibutuhkan pada masa sekarang untuk mengakomodasi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam tersebut.

Dalam era globalisasi, bangsa Indonesia dituntut mempunyai wawasan, pengetahuan maupun ketrampilan yang tinggi selaras dengan kemajuan teknologi masa kini. Hal ini berimplikasi pada pendidikan yang harus mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar dapat menyesuaikan tuntutan zaman. Bila tidak, akan tertinggal jauh dengan negara-negara lain di dunia. Kenyataan yang ada sekarang ini, bangsa Indonesia sudah tertinggal jauh dengan negara-negara berkembang lainnya khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Gerakan reformasi pendidikan di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (UU RI No. 20 tahun 2003). Gerakan reformasi pendidikan yang dimaksud adalah pembaharuan

sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia dengan mengembalikan pada tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam pembaharuan sistem pendidikan ini, dituntut peran serta masyarakat dengan mengakomodasikan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi lingkungan masing – masing. Inilah yang dimaksud dengan prinsip demokrasi dan desentralisasi pendidikan.

Lebih lanjut dalam UU RI No. 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan nasional, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam (Penjelasan atas UU RI No. 20 tahun 2003: 2). Diversifikasi kurikulum adalah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi dan lingkungan daerah yang beragam, mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah majemuk dengan berbagai adat dan budayanya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan mempunyai peran strategis. Penempatan dalam posisi strategis dikarenakan kandungan isi kurikulum memuat tujuan pendidikan, materi, sumber, strategi dan metode pembelajaran, peserta didik, pengajar, fasilitas dan evaluasi hasil belajar.

Beberapa pembaharuan kurikulum telah dilaksanakan di Indonesia. Pembaharuan kurikulum tersebut dimulai dari Kurikulum 1968, kemudian Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Kurikulum 2004,

terakhir sedang dikembangkan Kurikulum 2006 sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 2004. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perbedaan yang esensial dari kurikulum-kurikulum tersebut adalah orientasi pencapaiannya. Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984 berbasis pada pencapaian materi, Kurikulum 1994 berbasis pencapaian tujuan, sedangkan Kurikulum 2004 dan 2006 berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan penyempurnaan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Pada awal ditetapkannya KTSP di Kabupaten Boalemo khususnya mata pelajaran PKn sekolah dasar, banyak guru yang kurang paham dengan standar isi dalam materi pembelajaran PKn. Di samping itu kurangnya sarana prasarana yang mendukung seperti buku-buku yang relevan dengan materi PKn sekolah dasar masih sangat terbatas. Ketidakmampuan guru PKn sekolah dasar dalam memahami KTSP akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda terhadap materi pelajaran PKn itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini, peneliti memformulasikan judul yaitu “ Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam pembelajaran PKn di SDN 10 Paguyaman Kabupaten Boalemo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurang bervariasinya metode pembelajaran yang digunakan guru PKn di SD Negeri 10 Paguyaman.
2. Siswa di SD Negeri 10 Paguyaman merasa bosan dengan metode pembelajaran guru PKn yang kurang bervariasi.
3. Adanya rasa bosan dari siswa di SD Negeri 10 Paguyaman menyebabkan materi yang disampaikan guru PKn tidak sepenuhnya terserap oleh siswa sehingga hasil belajarnya kurang maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kurikulum KTSP dalam pembelajaran PKn di SDN 10 Paguyaman ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum KTSP pada pembelajaran PKn di SDN 10 Paguyaman ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang implementasi kurikulum KTSP pada pembelajaran PKn di SDN 10 Paguyaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum KTSP pada pembelajaran PKn di SDN 10 Paguyaman.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada:

1. Guru mata pelajaran PKn SDN 10 Paguyaman dapat memahami KTSP dan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran PKn.
2. Sekolah dalam melaksanakan sosialisasi KTSP pada mata pelajaran PKn dapat mempersiapkan segala sarana prasarana yang mendukung agar implementasi KTSP terus ditingkatkan.
3. Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum setelah menyelesaikan studi dan menjadi calon pengajar nanti.